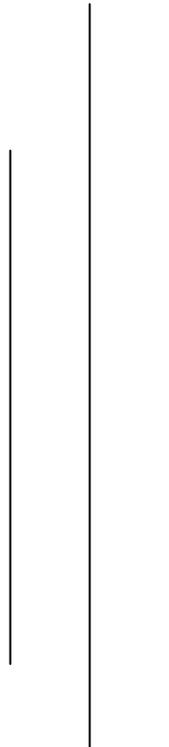




**PENETAPAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini dapat diselesaikan dengan baik. Penetapan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini memuat kondisi umum, tujuan, sasaran, isu - isu strategis yang menjadi agenda pembangunan bidang perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang untuk Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya kami berharap agar Penetapan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kota Mungkid, November 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701115 199003 1 003

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d TW IV Tahun 2020.....	9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d TW III Tahun 2021 .....	11
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah....	15
2.3. IKU Dishub Tahun 2020 .....	17
BAB III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah....	22
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	24
4.1. Program dan Kegiatan Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	24
BAB V : PENUTUP .....	29
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan Tahun Anggaran 2022 yang telah disempurnakan dibahas dengan pemangku kepentingan dalam desk pemetaan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sesuai nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 untuk memperoleh saran pertimbangan dengan unsur perwakilan Bappeda dan Litbangda Pemerintah Kabupaten Magelang.

Penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 – 2024 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Fungsi Penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah menyesuaikan Perangkat Daerah baru.

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 memuat evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Triwulan III Tahun 2021 bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan yang disusun dalam Penetapan Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran renstra Perangkat Daerah.

Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan senantiasa mengupayakan untuk meningkatkan dan pemeratakan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka peningkatan implementasi kebijakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancanagan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dengan mempedomani tugas pokok dan fungsi yang ada, maka perlu dijelaskan kendala bentuk kebijakan, program dan kegiatan, Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, dalam bentuk Penetapan Renja Perangkat Daerah yang berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 -2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);

12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 55);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2021 Nomor 35).

### **1.3 Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024;

- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang;
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan Dokumen Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika penulisan

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021  
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

## BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan Penetapan Renja Perangkat Daerah  
Tahun 2022

## BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2020**

Program pembangunan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang tahun 2020 terdapat 5 (lima) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Program peningkatan pelayanan angkutan
4. Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
5. Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas

Berdasarkan program diatas kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka;
  - b. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
  - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
  - e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
  - f. Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara
2. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
  - d. Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah

3. Program peningkatan pelayanan angkutan
  - a. Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
  - b. Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
4. Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
  - a. Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana Sarana Perhubungan
  - b. Pengelolaan Parkir
  - c. Survey Potensi parkir
  - d. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
  - e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Angkutan Darat
5. Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas
  - a. Pengamanan Lalu Lintas untuk Acara Tertentu
  - b. Pengembangan Pelayanan Angkutan
  - c. Pembayaran Rekening LPJU
  - d. Pengelolaan LPJU
  - e. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Jalan
  - f. Peningkatan Keselamatan LLAJ
  - g. Fasilitasi Koordinasi LLAJ

Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan IV TA 2020**

KODE			URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2020	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2020	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2020		
				%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2		3	4	5	6	7	8 = 7/5	9	
			<b>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan</b>							
2.9	01	17	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah	100,00	Sangat tinggi	1.252.992.067	1.252.992.067	1.084.063.817	86,52	Tinggi
			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah							
2.9	01	18	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Sangat tinggi	122.065.750	122.065.750	118.725.663	97,26	Sangat Tinggi
			Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah							
2.9	11	17	Program peningkatan pelayanan angkutan	100,00	Sangat tinggi	815.233.250	815.233.250	782.404.421	95,97	Sangat Tinggi

KODE	URUSAN / PROGRAM			CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2020	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2020	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN IV TAHUN 2020		
				%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2			3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
			Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji							
2.9	11	22	Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	100,00	Sangat tinggi	665.058.905	665.058.905	636.593.407	95,72	Sangat Tinggi
			Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan							
2.9	11	23	Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	100,00	Sangat tinggi	2.694.077.380	22.694.077.380	22.063.979.514	97,22	Sangat Tinggi
			Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas							
			Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas							
			JUMLAH	100,00	Sangat tinggi	25.549.427.352	25.549.427.352	24.685.766.822	96,62	Sangat Tinggi

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang terdiri dari Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan, dengan jumlah program 5 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa:

5 (lima) program masuk dalam predikat kinerja sangat tinggi

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan masuk dalam predikat sangat tinggi dengan nilai 100.00 %.

## **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan III Tahun 2021**

Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Program :

- 1) Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan keuangan perangkat daerah
- 2) Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah

### b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator Program :

- 1) Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan
- 2) Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas
- 3) Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas
- 4) Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan

Berdasarkan program diatas kemudian diimplementasikan ke dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi PD yang dikelola.

- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah kegiatan yang dikelola

- 3) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan : Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan yang dikelola

- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan : Terfasilitasnya Administrasi Kepegawaian PD
  - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Indikator kegiatan : Terfasilitasnya penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan : Terfasilitasnya pelayanan umum perangkat daerah
  - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Indikator kegiatan : Terfasilitasnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan : Terlaksananya pemeliharaan dan penyediaan perlengkapan jalan
  - 2) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  
Indikator kegiatan : Terlaksananya pengelolaan terminal penumpang tipe C
  - 3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  
Indikator kegiatan : Terlaksananya pelayanan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir
  - 4) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  
Indikator kegiatan : Terlaksananya pelayanan uji kendaraan bermotor
  - 5) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan : Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas
  - 6) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  
Indikator kegiatan : Terfasilitasnya pelayanan angkutan umum kabupaten / kota

Hasil Evaluasi sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai dengan Triwulan III TA 2021**

KODE	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2021	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN III TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN III TAHUN 2021				
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9		
<b>2</b>	<b>15</b>		<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN</b>							
2	15	01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	78,40	Tinggi	6.232.016.500	488.446.971	4.225.500.745	67,80	Sedang
			Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja PD dan keuangan perangkat daerah							
			Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah							
2	15	02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	78,13	Tinggi	21.965.265.230	17.935.005.695	15.664.773.315	71,32	Sedang
			Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan							
			Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas							

KODE	URUSAN / PROGRAM	CAPAIAN KINERJA		ANGGARAN TAHUN 2021	TARGET ANGGARAN s/d TRIWULAN III TAHUN 2021	REALISASI ANGGARAN s/d TRIWULAN III TAHUN 2021		
		%	PREDIKAT KINERJA			SPJ	%	PREDIKAT KINERJA
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/5	9
	Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas							
	Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan							
	JUMLAH	78,19	Tinggi	28.197.281.730	18.423.452.666	19.890.274.060	70,54	Sedang

Hasil evaluasi pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan yang terdiri dari Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan, dengan jumlah program 2 program. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa:

2 (dua) program masuk dalam predikat tinggi,

Secara keseluruhan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Perangkat Daerah Dinas Perhubungan masuk dalam predikat tinggi dengan nilai 78,19%.

### 2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2018 – 2021\***

Indikator		2018	2019	2020	2021
Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan					
1	Jumlah halte yang terbangun	11	12	12	12
2	Jumlah terminal yang dipelihara	6	6	6	6
3	Jumlah parkir yang terbangun	175	225	238	230
Persentase ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas					
1	Jumlah APILL yang dipelihara	18	18	18	18
2	Jumlah rambu yang terbangun	2.574	2.574	2.681	2.681
3	Jumlah marka yang terbangun	11.660	11.660	11.660	11.660
4	Jumlah zebra cross yang terbangun	20	20	20	20
5	Jumlah PJU yang terbangun	2.610	2.610	2.962	2.962
6	Jumlah guardrail yang terbangun	5.104	5.104	5.104	5.104
7	Jumlah ITS yang terbangun	-	-	-	-

Indikator		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk angkutan umum	86	126	126	126
2	Jumlah bimbingan dan penyuluhan bidang keselamatan lalu lintas untuk pelajar	79	128	128	128
Persentase angkutan umum layak jalan					
1	Kendaraan bermotor yang diuji	18.832	19.491	14.369	11.642

\* Data sd September 2021

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

**Tabel 2.4**  
**IKU DISHUB TAHUN 2020**

PROGRAM	INDIKATOR	% PROGRAM		% IKU		CAPAIAN IKU
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	
Program Pengembangan Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	1. Persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan	81,1	77,5	68,97	48,6	70,47
Program Peningkatan Pengamanan dan Keselamatan Lalu Lintas	2. Persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	59,69	43,6			
	3. Persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	43,69	29,8			
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	4. Persentase peningkatan angkutan umum layak jalan	91,38	43,49			

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang selain mengacu Renstra dan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 juga menyelaraskan dengan arah dan kebijakan kementerian terkait yaitu Kementerian Perhubungan. Hal ini dilakukan agar apa yang telah ditetapkan sebagai arah kebijakan kementerian dapat diselaraskan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang.

Sasaran pembangunan nasional beserta indikator sektor transportasi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berkaitan dengan kepentingan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

## Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
1	Terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi	Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perparkiran	Belum optimalnya ketersediaan prasarana angkutan jalan	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
2	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air	Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal	Perumusan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, perpustakaan, dan kesekretariatan	Belum optimalnya keamanan dan keselamatan lalu lintas	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas pendukung transportasi
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antarwilayah	Pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan perpustakaan			

No	Sasaran Renstra K/L	Sasaran Renstra PD Provinsi	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
					Pendorong	Penghambat
3	Terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal		Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan, teknik dan prasarana, pengelolaan terminal tipe C, dan parkir	Belum optimalnya layanan angkutan	Terus dikembangkan sarana prasarana dan pelayanan angkutan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	Belum dilaksanakan adanya evaluasi mengenai lalu lintas dan angkutan jalan
4	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan	Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim	Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis	Belum optimalnya ketersediaan prasarana angkutan jalan	Pengoptimalan sarana prasarana dan SDM yang dimiliki	Kurang tersedianya sarana, prasarana dan pendukung unit pengujian kendaraan bermotor

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Visi pembangunan daerah adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Bupati Magelang menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera berdaya saing dan amanah. Adapun visi pembangunan Tahun 2019 – 2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”**.

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Perhubungan pada kurun waktu 2019-2024 akan melaksanakan misi kedua yaitu “Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup”.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik, dan pelestarian lingkungan hidup.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi yang akan dijalankan serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan visi, misi, dan isu strategis yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikator Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN					KONDISI AKHIR KINERJA
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Perhubungan	Cakupan Pembangunan Infrastruktur perhubungan	% (persen)	55,27	62,29	68,96	75,62	82,62	89,54	96,49	96,49

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program dan Kegiatan Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Hasil Pemetaan sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2019

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dengan 2 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dalam 2 program tersebut kemudian dijabarkan dalam 11 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan. Berdasarkan nomenklatur Permendagri Nomor 19 Tahun 2019 pemetaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun adalah sebagai berikut :

<b>URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>	<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN</b>		<b>27.835.454.000</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>6.019.667.000</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>35.252.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renja PD yang tersusun	2 dokumen 5.000.000

<b>URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>		<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	41 dokumen	30.252.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5.250.128.000</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	53 pegawai	5.075.002.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 bulan	175.126.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>114.050.000</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	15 41 kali 23	114.050.000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>315.876.000</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah arsip yang dikelola Jumlah surat yang dikelola	2 arsip yang dikelola surat 6500	100.032.000

<b>URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>		<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan	12 bulan	215.844.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>304.361.000</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Roda 2 yang dipelihara Jumlah Kendaraan Roda 4 yang dipelihara	25 9 kend	290.041.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	1 paket	34.143.000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Perlengkapan Kantor yang terpelihara	1 paket	2.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket	268.218.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			<b>21.815.787.000</b>
<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>19.145.631.000</b>

<b>URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>		<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah APILL yang terpelihara Jumlah Pemeliharaan CCTV yang terpelihara Jumlah pemeliharaan LPJU Jumlah Pemeliharaan Lampu Flashing Jumlah rekening PJU yang terbayarkan	18 titik 11 titik 3000 titik 3 titik 3 rayon	19.145.631.000
<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>			<b>785.000.000</b>
Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah terminal yang direhabilitasi	3 terminal	50.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah terminal yang dikelola	6 terminal	735.000.000
<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>			<b>285.000.000</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah titik parkir yang dikelola	265 titik	285.000.000
<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>			<b>788.656.000</b>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang lulus uji	15452 kend	426.500.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti lulus uji yang tercetak	10000 set	252.156.000

<b>URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>Keluaran Sub Kegiatan</b>		<b>PAGU INDIKATIF (Rp)</b>
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji yang terpelihara	12 alat uji	110.000.000
<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>			<b>786.500.000</b>
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 dokumen	50.000.000
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Operasi laik jalan Jumlah pengamanan tamu pemda dan CFD Jumlah Posko Angkutan Lebaran, natal dan Tahun baru	48 kali 76 kali 2 kali	736.500.000
<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>25.000.000</b>
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah trayek yang ditata	20 jalur	25.000.000
			<b>27.835.454.000</b>

**BAB V**  
**PENUTUP**

Penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 senantiasa memperhatikan prioritas pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 serta Nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 guna efektifitas dan efisiensi penyusunan prioritas pembangunan Tahun 2022. Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan Penetapan Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2022 ini sebagai pedoman perencanaan. Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. Dengan demikian, setelah Penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ini ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka pendek tahunan yang sesuai dengan Perangkat Daerah baru.

Kota Mungkid,            November 2021  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG



**IMAM BASORI, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701115 199003 1 003

# **LAMPIRAN**



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 81);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 33);

13. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022.

#### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2022.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Magelang Tahun 2022.

#### Pasal 2

- (1) Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Renja Dinas Kesehatan;
  - c. Renja Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan;
  - d. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
  - f. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
  - g. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - h. Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - i. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - j. Renja Dinas Pertanian dan Pangan;
  - k. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
  - l. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - m. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - n. Renja Dinas Perhubungan;
  - o. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - p. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  - q. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - r. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
  - s. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - t. Renja Dinas Peternakan dan Perikanan;
  - u. Renja Sekretariat Daerah;
  - v. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- w. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- x. Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- z. Renja Inspektorat;
- aa. Renja Kecamatan Salaman;
- bb. Renja Kecamatan Borobudur;
- cc. Renja Kecamatan Ngluwar;
- dd. Renja Kecamatan Salam;
- ee. Renja Kecamatan Srumbung;
- ff. Renja Kecamatan Dukun;
- gg. Renja Kecamatan Sawangan;
- hh. Renja Kecamatan Muntilan;
- ii. Renja Kecamatan Mungkid;
- jj. Renja Kecamatan Mertoyudan;
- kk. Renja Kecamatan Tempuran;
- ll. Renja Kecamatan Kajoran;
- mm. Renja Kecamatan Kaliangkrik;
- nn. Renja Kecamatan Bandongan;
- oo. Renja Kecamatan Candimulyo;
- pp. Renja Kecamatan Pakis;
- qq. Renja Kecamatan Ngablak;
- rr. Renja Kecamatan Grabag;
- ss. Renja Kecamatan Tegalrejo;
- tt. Renja Kecamatan Secang;
- uu. Renja Kecamatan Windusari; dan
- vv. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(3) Isi beserta uraian Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Oktober 2021  
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 28 Oktober 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Maju Rencana Tahun 2023		
							Target Capaian Kinerja	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Kegiatan	Kegiatan				Target	Target	Target
2							28.125.495.000			6.309.708.000				33.591.566.180	
2							6.309.708.000			35.252.000				8.535.005.180	
2	15	01												38.750.000	
2	15	01	2.01												
2	15	01	2.01												
2	15	01	2.01	01											
2	15	01	2.01	06											
2	15	01	2.02												
2	15	01	2.02	01											
2	15	01	2.02	02											
2	15	01	2.02	03											
2	15	01	2.02	04											
2	15	01	2.02	05											
2	15	01	2.04												
2	15	01	2.04	02											

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktisan Maju Rencana Tahun 2023		
						Target Capaian Kinerja		Target				Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan						Hasil Kegiatan	
2 15 01 204 05	Pengolahan Data Reributasi Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	Jumlah dokumen reributasi yang dikelola	Cakupan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan PD	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	66,67 %	1 dokumen	66,67 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	66,67 %	75.000.000
2 15 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								0					
2 15 01 205 02	Pengadaan Pakakan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah seragam dan atribut ASN yang disediakan	Cakupan Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	66,67 %	135 set	66,67 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	171.000.000
2 15 01 205 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Frekuensi pembinaan ASN Jumlah ASN yang dibina Jumlah JFT yang terfasilitasi Jumlah tenaga honorier / kontrak	Cakupan Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	66,67 %	6 kali 65 pegawai 7 JFT 84 harlap/SS	66,67 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	0
2 15 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah								114.050.000					455.681.000
2 15 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	Cakupan Administrasi Umum PD	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	66,67 %	2 paket 0 paket	66,67 %	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	365.681.000
2 15 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah perjanjian dinas Jumlah pelajaran dinas Jumlah rapat yang terlaksana Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	Cakupan Administrasi Umum PD	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	66,67 %	15 kali 41 kali 23 kali	66,67 %	114.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	90.000.000
2 15 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								315.876.000					266.873.180
2 15 01 208 02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah arsip yang dikelola Jumlah surat yang dikelola	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	2 arsip yang dikelola 6500 surat	66,67 %	100.032.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	50.993.180
2 15 01 209	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tebayarkan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Kab. Magelang, Mungkid, Burnirejo	66,67 %	12 bulan	66,67 %	215.844.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	215.880.000
2 15 01 209 01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								594.402.000					826.270.000
2 15 01 209 01	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah kendaraan Roda 2 yang dipelihara Jumlah kendaraan Roda 4 yang dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	66,67 %	25 kendaraan 8 kendaraan	66,67 %	290.041.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	290.041.000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target			
						Rencana Tahun 2022					Paktrian Maju Rencana Tahun 2023						
2	15	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Perengkapan Kantor yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kab. Magelang, Munghid, Semua Kelurahan	66,67 %	1 paket	66,67 %	2.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	5.348.000
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kab. Magelang, Munghid, Semua Kelurahan	66,67 %	1 paket	66,67 %	34.143.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	80.881.000
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	Jumlah gedung Kantor yang terhabilitasi yang terpelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Kab. Magelang, Munghid, Semua Kelurahan	66,67 %	1 paket	66,67 %	268.218.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	66,67 %	450.000.000
<b>PROGRAM PENYELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN (LLAJ)</b>																	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah Cemran Tikungan yang terbangun Jumlah Guardrail yang terbangun Jumlah ITS yang terbangun Jumlah marka jalan yang terbangun Jumlah rambu yang terbangun Jumlah Traffic Cone yang terbeli Jumlah Water barrier yang terbeli Jumlah zebra cross yang terbangun	Cakupan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Kecamatan, Semua Kelurahan	79,68 %	0 halte	69,24 %	19.145.631.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	79,68 %	180.000.000
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Cakupan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Kecamatan, Semua Kelurahan	79,68 %	0 meter	69,24 %	0 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	79,68 %	0
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Jumlah perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	Cakupan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Kecamatan, Semua Kelurahan	79,68 %	0 meter	69,24 %	0 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase ketersediaan fasilitas perengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas	79,68 %	0



**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Praktikan Maju Rencana Tahun 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		
						Target Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 15 02 204 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	Jumlah titik parkir yang terkelola	Cakupan Penyetoran Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90,55 %	265 titik	90,55 %	285.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ketersediaan prasarana angkutan jalan	90,55 %	300.000.000
2 15 02 205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								788.656.000					475.000.000
2 15 02 205 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah kendaraan yang lulus uji	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	92,47 %	15452 Kend.	92,47 %	426.500.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	92,47 %	0
2 15 02 205 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah bukti lulus uji yang tercatat	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	92,47 %	10000 set	92,47 %	252.156.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	92,47 %	375.000.000
2 15 02 205 05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji		Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	92,47 %	0	92,47 %	0 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	92,47 %	0
2 15 02 205 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah Alat Uji yang terpelihara	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Magelang, Mungkid, Semua Kelurahan	92,47 %	12 alat uji	92,47 %	110.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase layanan uji kendaraan bermotor wajib uji	92,47 %	100.000.000
2 15 02 206	Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								786.500.000					1.261.561.000
2 15 02 206 01	Penataan Manajemen dan Rekrayasa Lulu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	Jumlah Dokumen Manajemen Rekrayasa Lulu Lintas	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,78 %	1 dokumen	67,78 %	50.000.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	67,78 %	110.350.000
2 15 02 206 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	Jumlah operasi laik jalan pemda dan CFD Jumlah Posko Angkutan Lebaran, natal dan Tahun baru	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,78 %	48 kali 76 kali 2 kali	67,78 %	736.500.000 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	67,78 %	1.101.211.000
2 15 02 206 05	Forum Lulu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	Jumlah koordinasi dan pelaksanaan forum (LAL)	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekrayasa Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,78 %	2 kali	67,78 %	0 (PAD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas	67,78 %	50.000.000
2 15 02 209	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								25.000.000					35.000.000

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Magelang  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN  
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Cetakan Penting	Praktiraan Maju Rencana Tahun 2023			
							Target Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
													Tolok Ukur	Target		
2	Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67,78 %	20 jalur	67,78 %	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase masyarakat sadar bidang keselamatan berlatu lintas	67,78 %	35.000.000	
15	02	2.09	02													
<b>TOTAL</b>										<b>28.125.495.000</b>					<b>33.591.566.180</b>	